

**FOKUS DAN
RUANG
LINGKUP**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure memfokuskan pada bidang Hukum, menerima naskah karya tulis ilmiah hasil penelitian di bidang hukum, dan tinjauan hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain.

LEMBAGA PENERBIT

Jurnal Penelitian Hukum De Jure diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM R.I.

p-ISSN 1410-5632

e-ISSN 2579-8561

Edisi jurnal elektronik tersedia pada:

<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure>

INDEKSASI

Google Scholar; Indonesian Scientific Journal Database (ISJD); Indonesian Publication Index (IPI) Public Knowledge Project (PKP) Index; CiteULike; Academic Research Index (Research Bib); Zotero; Indonesia One Search; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); dan MORAREF

**FREKUENSI
PUBLIKASI**

Terbit sebanyak empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI ARTIKEL

Setiap artikel yang disampaikan ke Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum tidak dikenakan 'Biaya Pemrosesan Artikel'. Ini mencakup review mitra bestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan dan pengarsipan, dan memungkinkan akses langsung ke versi teks lengkap dari artikel.

**ALAMAT
KORRESPONDENSI**

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021- 2525015
Faksimili 021-2526438
Laman: www.balitbangham.go.id
Email: ejournaldejure@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Indexed by:



HALAMAN KOSONG

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HakAsasi Manusia

Pengarah

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HakAsasi Manusia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum

Henry Donald Lbn Toruan, S.H., M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Pemimpin Redaksi

Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)
Nevey Varida Ariani, SH., M.H, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)
Hardianto Djanggih, S.H, M.H. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai)
Muhaimin, S.H., (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H., M.Si. Jaya Laksana, S.E

Sekretariat

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. Asmadi, S.H

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom.M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T.(Teknologi Informasi)

Harysandy Permana, S.Kom. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

MitraBestari

1. Prof. Dr. F.X. Joko Priyono, S.H., M.Hum.
Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2. Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.
Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Dr. Ti Hayati, S.H., M.H.
Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
4. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.
Hukum Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Dr. Hadi Supratikta, M.M.
Otonomi Daerah, Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail.com
jurnaldejure@yahoo.com
ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap di *submit* pada aplikasi *Open Journal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	v
ADVERTORIAL	vii
KUMPULAN ABSTRAK	ix
 Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana <i>(Commissioner Judge Legal Standing in Draft of Criminal Procedural Law)</i>	433 - 444
Mosgan Situmorang	
 Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah <i>(Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organization by the Government)</i>	445 - 464
Muhammad Reza Winata	
 Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh <i>(Mukim and Gampong-based Population Affairs Administration in the Province of Aceh)</i>	465 - 476
M. Jafar dan Sulaiman	
 Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat <i>(Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)</i>	477 - 496
Yul Ernis	
 Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah) <i>(Adoption of foreign laws into national laws (A review to Shariah Bank Agreement))</i>	497 - 512
Evi Djuniarti	
 Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan bagi Indonesia <i>(Transplantation of business law in globalization era a Challenge for Indonesia)</i>	513 - 524
Syprianus Aristeus	

Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (<i>Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy</i>)	525 - 542
---	-----------

Nizar Apriansyah

Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime</i>)	543 - 560
--	-----------

Okky Chahyo Nugroho

BIODATA PENULIS	xix - xx
-----------------------	----------

PEDOMAN PENULISAN	xxi - xxii
-------------------------	------------

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* yang diterbitkan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** bekerjasama dengan **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** bisa kembali menerbitkan Volume terakhir yakni Volume 18 Nomor 4 Desember 2018.

Penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di edisi ini memuat 8 (Sembilan) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil-hasil penelitian/pemikiran ilmiah para peneliti dari berbagai lembaga dan instansi penelitian. Diharapkan dari hasil penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi yang berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.

Para pembaca *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, menilik persoalan-persoalan hukum di tahun 2018 yang konon disebut tahun politik ini terus berlanjut, disinyalir banyaknya aturan yang dikeluarkan ternyata tidak mengurangi jumlah pelanggaran hukum. Apabila pelanggaran-pelanggaran hukum apakah itu seperti korupsi, pembunuhan secara sadis apabila dibiarkan terus menerus, maka fungsi hukum yang tidak lagi mampu menjaga ketertiban masyarakat melalui norma. Sehingga hukum yang diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keadilan menjadi hilang di tengah masyarakat.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas Redaksi Jurnal Hukum De Jure, dalam penerbitan akhir tahun 2018 ini menerbitkan tema-tema tulisan dari berbagai hasil penelitian dan kajian untuk kiranya dapat menjadi masukan bagi para pihak-pihak sebagai penyempurnaan perubahan peraturan perundang-undangan. Diantara tulisan-tulisan tersebut yaitu Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Hukum Acara Pidana, Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah, Tanggung Jawab Negara dalam Pengangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur dan lain-lainnya bisa dilihat dalam jurnal ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** dan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** yang telah berkenan membantu dalam penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils dalam penerbitan ini.

Redaksi

Jakarta, Desember 2018

HALAMAN KOSONG

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Mosgan Situmorang (Law Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Commissioner Judge Legal Standing in Draft of Criminal Procedural Law

Law Research Journal De Jure, 2018 December, Volume 18, Number 4, Page 433 - 444

The Law No. 8 of 1981 regarding Criminal Procedural Law, commonly known as KUHAP in Indonesian language, has been 37 years old of age. Within the period this Law has been playing significant roles in the law enforcement efforts in Indonesia in particular as the basis for the criminal law enforcement and proceedings. As a work that was once considered phenomenal at the time of its enactment it turns out that KUHAP has also some deficiencies that have been discovered during the period of its implementation. One issue that recently has become under the spotlight is the one that relates to the pre-trial proceedings, provided for in the KUHAP. The provisions regarding pre-trial proceedings are made for the purpose of protecting Human Rights, in particular the rights of the party who has been pronounced as an offender in a criminal proceeding. Realizing the deficiencies in such pre-trial proceedings then in the discussion of the KUHAP amendment, a Commissioner Judge is introduced in place of the pre-trial proceedings. Since the introduction of this commissioner judge into the draft of Criminal Procedural Law despite of some pros and cons, the issue has been discussed many times in some seminars and workshops. To find out further what this Commissioner Judge institution is, it is considered necessary to conduct a research. The issues dealt with in this study has been the roles of commissioner judge institution in the draft of KUHAP. While the purpose of this research is to identify the roles played by the commissioner judge institution in the draft of KUHAP. The method used in this research has been juridical normative. From the research one may conclude that this Commissioner Judge institution is aimed to substitute the roles of pre-trial proceedings provided for in the KUHAP for the purpose of protecting the offender's rights in a more better way. Therefore it is recommended that the Commissioner Judge that has been introduced into the draft of KUHAP should be maintained when the draft is approved as a law.

Keywords: Commissioner Judge institution

Muhammad RezaWinata (Constitutional Court of the Republic Indonesia)

Legal Policy and Constitutionality of Authority in Dissolution of Legally Registered Societal Organizations by the Government

Law Research Journal De Jure, 2018 December, Volume 18, Number 4, Page 445 - 464

Societal Organizations are the materialization of the freedom of association. However, some polemics have arisen in the state administration due to the authority to dissolve these legally registered Societal Organizations granted to the Government. This article is to discover the development of legal politics and constitutionality of authority in dissolving Societal Organizations granted to the Government. The research method employed is qualitative legal research with regulatory, doctrinal, and decisive approaches. The study demonstrates that the authority to dissolve Societal Organizations that previously was in the hand of the Government under the Law No. 8 of 1985, delegated to the Court under the Law No. 17 of 2013, but then revoked again by the Government under the Law No. 16 of 2017. The changes to these norms shows the direction of the legal policy that tends to return become repressive laws and violates the principles of democracy. While, the analysis on constitutionality of the authority has found: Firstly, there has been a violation against the principles of due process of law as provided for in Article 1 clause (3) of 1945 Constitution; Secondly, there has been a violation against the freedom of association as guaranteed by Article 28 and Article 28 E clause (3); Thirdly, it is not appropriate to apply the principle of *contrarius actus* against Legally Registered Societal Organizations as a legal subject, consequently it is reasonable that Article 62 clause (3) and 80 A Government Regulation in place of Law No. 2 of 2017 as set out in the Law No. 16 of 2017 is declared unconstitutional. In the future, it is important for the lawmakers to immediately revise the Law No. 16 of 2017 or the Constitutional Court to pass a conditional constitutional decision to return the authority to dissolve Societal Organizations to the court.

Keywords: Legal Policy, Constitutionality, Dissolution, Societal Organization, Freedom of Association

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

M. Jafar, Sulaiman (Faculty of Law, Syiah Kuala University)

Mukim and Gampong-based Population Affairs Administration in the Province of Aceh

Law Research Journal De Jure, 2018 December, Volume 18, Number 4, Page 465 - 476

There are unique government systems in Aceh, Mukim and Gampong-based system. This administration system is formally provided for in the Law No. 11 of 2006 regarding Aceh Administration. This article is intended to answer the questions on the roles of mukim and gampong administration system in the population affairs administration in the Province of Aceh. This research is a combination of normative study (by reviewing the laws and regulations) and empirical study (the operation of the laws). The goal of the study is to find out how far the laws regulating mukim and gampong can be applied to the population affairs administration system. Population affairs administration is a part of the public services a state provides her citizens with to meet the rights of the citizens. That's why the civil administration must be based on the existing system conforming to the rules in order to produce correct civil data. Anything generated from accurate civil data may be used in some cases to support the development. The Aceh Government is recommended to empower the mukim and gampong in order to assist the development processes down to the lowest levels.

Keywords: Administration, Population Affairs, Mukim, Aceh.

Yul Ernis (Law Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness

Law Research Journal De Jure, 2018 December, Volume 18, Number 4, Page 477 - 496

The success of a direct legal education is a little bit hard to measure from the qualitative aspect, but quantitatively it can be assessed through the success level indicators of legal culture in the public, degradation of legal culture that occurs in the public, such as putting the law in the people's own hands, sweeping by some members of community, and in addition the technology and information development has provided the public with easy access to any news related to any actions and deeds that may be considered as offences against the law. This study is aimed to figure out the implementation and method of direct legal education in improving public legal awareness and the influences of Legal Education to the public legal awareness. The research employs qualitative approach viewed from the aspect of application of regulation. the research shows that the implementation of legal education to the public by the relevant agencies all this time has been at the minimum level and has not given any significant influence for the improvement of public legal awareness due to the problems of inter alia: limited facilities and infrastructure, insufficient budget and limited competencies of the human resources. It is recommended that the frequency of the provisions of legal education should be increased and should be held in a continuous manner, both from the aspects of location and materials. It is also necessary to improve the quality and quantity of the human resources who will provide the legal education in order to enable them to act in a more professional way by means of competency tests. It is also necessary to provide joint Legal Education in a synergy among the relevant agencies. The direct legal education method by monologue means should be conducted in the more attractive way to the public.

Keywords: Direct Legal Education, Public Legal Awareness

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Evi Djuaniarti (Law Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Adoption of Foreign Laws Into National Laws (A review to Shariah Bank Agreement)

Law Research Journal De Jure, 2018 December, Volume 18, Number 4, Page 497 - 512

Some standard provisions of Civil Code have been transplanted into the loan agreements made with shariah bank that should have been made to completely be based on the provisions that comply with the Islamic law. In the practices, shariah banks should have expressed the terms and conditons complying with the Islamic law of Shariah into the loan agreements. The riba (interest) practices will not evenly distribute the wealth but accumulated to a handful parties owning the capital. The issue formulated in this Article is the application of the transplanted provisions, according to the civil codes, into loan agreement mudharabah muqayyadah of Bank BNI Syariah and what are governing provisions in the case of defaults under the loan agreement mudharabah muqayyadah. This study uses juridical normative method. This study is based on one analysis to the existing laws and regulations. adoption of laws as an effort to facilitate easy enforcement of a law in a country, one of which is shariah agreement

Keywords: Adoption of Foreign Laws, National, Shariah Bank Agreement

Syprianus Aristeus (Law Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

**Transplantation of Business Law in Globalization Era
a Challenge for Indonesia**

Law Research Journal De Jure, 2018 December, Volume 18, Number 4, Page 513 - 524

Investment policies in Indonesia currently are still problematic due to the obsolete laws and regulations in investment industry. In a line with the globalization era and participation in investment industry, in order to anticipate the provisions, legal transplantation must be made to fill the vacancy that occurs now. This study aims to find out the best way for the Indonesian government to fill the current business law vacuum. This research is a normative juridical research, where the focus of analysis is the legal norm contained in the literature and legislation. The conclusion that can be conveyed from this research is that trade liberalization, especially in business law has expanded to all commodities, including business law. For the Indonesian government this has an adverse impact considering the lagging legislation has an impact on investment. To be able to overcome this, the government can do transplants the law, especially in the field of business law.

Keywords: Transplantation, Business Law, Globalization

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Nizar Apriansyah (Policy Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy

Law Research Journal De Jure, 2018 December, Volume 18, Number 4, Page 525 - 542

Indonesia has abundant natural resources. The natural richness has provided diversity of unique indications, both flora and fauna, that gives various potential extraordinary natural gifts which in turn will give a rise to some agricultural, plantation, cultivation, cultural crated and forestry products that can be made geographical indications of the area where they exist. This natural potential must be protected within the framework of Geographical Indications, unique products of Indonesia. The problems are how to protect the geographical indications in Indonesia and whether or not the registration of the product as an geographical indications may improve the regional economy. This research is aimed to figure out and analyze geographical indications protection in Indonesia and how far the registration of a geographical indication may boost the improvement of regional economy. The analysis uses qualitative approach methodology and data were collected by means of interviews and field observation. The study figures out that the geographical indications protection in Indonesia has been mandated by the enactment of the Law No. 20 of 2018 regarding Marks and Geographical Indications. However, the implementation of the Law has seen some disadvantages, as the registration of a product as a geographical indication does add value to the product, but farmers have yet to completely enjoy the improvement.

Keywords: Protection, Geographical Indications, Regional Economy

Okky Chahyo Nugroho (Human Rights Research and Development Center, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights)

State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime

Law Research Journal De Jure, 2018 December, Volume 18, Number 4, Page 543 - 560

Human trafficking is a form of trans-national crime that increasingly widespread but difficult to detect. This crime is found mainly in developing countries, that have large population, and unbalance population of males and females. The purpose of this article is to find out the state responsibility in mitigating human trafficking cases and the obstacles encountered in East Nusa Tenggara, the object of the study. General benefits as expected as information materials for the public with regard to the human trafficking crimes, and in particular is expected as a feedback to the stakeholders for better policies making. The method of this article is descriptive-analysis with qualitative approach, depicting the researched objects or subjects pursuant to the collected data and information which then followed with quantitative analysis. The state responsibility in mitigating human trafficking crime is by establishing a preventive and mitigating Task Force. This Task Force has not been optimum due to its coordinative characteristics and the existing Indonesian Workers placement system that has been failed to provide protection from the practice's earliest stage, in disagreement with the human trafficking preventive measures. Human trafficking is an extraordinary crime, hence it must be handled in an extraordinary way also. Consequently it is necessary to revise Article 1 of President Regulation of the Republic of Indonesia No 69 of 2008 regarding Human Trafficking Crime Prevention and Mitigation Task Force to change its institution into an operational instead of coordinative one.

Keywords: Responsibility, State, Prevention, Mitigation, Human Trafficking

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Mosgan Situmorang (Pusat Penelitiandan PengembanganHukum Badan PenelitiandanPengembangan Hukum dan HakAsasi Manusia)

Kedudukan Hakim Komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 3, Desember 2018, Halaman 433 - 444

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP telah berumur 37 tahun. Dalam kurun waktu tersebut undang-undang ini sudah bereperan besar dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya sebagai dasar dalam penegakan dan proses hukum pidana. Sebagai karya yang dianggap sangat fenomenal pada waktu pengundangannya ternyata KUHAP juga mempunyai kekurangan yang ditemukan dalam perjalanan penerapannya. Salah satu hal yang akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah menyangkut masalah pra peradilan, yang terdapat dalam KUHAP. Ketentuan mengenai pra peradilan dibuat dengan maksud untuk melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam proses pidana. Menyadari adanya kekurangan dalam pra peradilan maka dalam pembaharuan KUHAP diperkenalkan adanya hakim komisaris sebagai pengganti lembaga pra peradilan. Lembaga hakim komisaris ini sudah dimasukkan dalam RUU Hukum Acara Pidana walaupun masih menuai pro dan kontra, Lembaga Hakim Komisaris ini sudah banyak dibahas di dalam seminar-seminar dan diskusi-diskusi. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai keberadaan lembaga Hakim Komisaris ini maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran lembaga hakim komisaris dalam RUU KUHAP. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran lembaga Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah juridis normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Hakim Komisaris ini dimaksudkan untuk mengganti peran pra peradilan yang diatur di dalam KUHAP yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dengan cara yang lebih baik. Dengan demikian disarankan agar keberadaan Hakim Komisaris yang telah dimasukkan dalam RUU KUHAP tetap dipertahankan apabila RUU tersebut menjadi undang-undang.

Kata Kunci: Lembaga Hakim Komisaris

Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Muhammad Reza Winata (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 4, Desember 2018, Halaman 445 - 464

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, muncul polemik ketatanegaraan karena pemberian kewenangan menentukan pembubaran Ormas Berbadan Hukum kepada Pemerintah. Artikel ini hendak menemukan perkembangan politik hukum dan konstitusionalitas kewenangan pembubaran Ormas oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan regulasi, doktrinal, dan putusan. Hasil kajian menunjukkan kewenangan pembubaran Ormas, semula ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985, lalu diputuskan oleh pengadilan berdasarkan UU No. 17 tahun 2013, tapi akhirnya ditentukan kembali oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017. Perubahan rumusan norma ini menunjukkan arah politik hukum yang bertendensi hukum represif dan melanggar prinsip demokrasi. Sedangkan, analisis konstitusionalitas kewenangan menemukan: *Pertama*, terjadi pelanggaran terhadap asas *due process of law* sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; *Kedua*, terjadi pelanggaran terhadap hak berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3); *Ketiga*, tidak tepat menerapkan asas *contrarius actus* terhadap Ormas Berbadan Hukum sebagai subjek hukum, sehingga sudah seharusnya Pasal 62 ayat (3) dan 80 A Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2017 dinyatakan inkonstitusional. Kedepannya, sangat penting pembentuk undang-undang segera merevisi UU No. 16 Tahun 2017 atau Mahkamah Konstitusi memberikan putusan konstitusional bersyarat yang mengembalikan kewenangan menentukan pembubaran Ormas kepada pengadilan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Konstitusionalitas, Pembubaran, Organisasi Kemasyarakatan, Hak Berserikat dan Hak Berkumpul

Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

M. Jafar, Sulaiman (Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala)**Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 4, Desember 2018, Halaman 465- 476

Ada sistem pemerintahan yang khas di Aceh, yakni berbasis mukim dan gampong. Sistem pemerintahan ini secara formal diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artikel ini ingin menjawab permasalahan terkait bagaimana peran pemerintahan mukim dan gampong dalam penataan administrasi kependudukan di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian normatif (mengkaji perundang-undangan) dan empiris (melihat bekerjanya hukum). Spesifikasi penelitian, ingin melihat sejauhmana hukum yang mengatur mukim dan gampong bisa diterapkan terhadap sistem administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah salah satu bagian dari pelayanan publik yang diberikan negara kepada warganya untuk memenuhi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi sipil harus didasarkan pada sistem yang ada yang sesuai dengan aturan sehingga akan menghasilkan data sipil yang benar. Hal ini dihasilkan dari data sipil yang akurat dapat digunakan di beberapa bidang untuk mendukung pembangunan. Pemerintah Aceh disarankan melakukan penguatan terhadap mukim dan gampong untuk membantu proses pembangunan hingga pada tingkat bawah.

Kata Kunci: Penataan, Administrasi Kependudukan, Mukim, Aceh**Yul Ernis (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)****Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 4, Desember 2018, Halaman 477 - 496

Keberhasilan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan agak sulit diukur dari segi *kualitatif*, tetapi secara *kuantitatif* dapat diketahui melalui Indikator-indikator keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat, degradasi budaya hukum yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat, dan disamping itu perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan metode Penyuluhan Hukum langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang ditinjau dari segi penerapan peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena terkendala dengan permasalahan antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan SDM. Saran Frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum sebaiknya volumenya ditingkatkan dilakukan secara berkesinambungan, baik tempat maupun materinya, perlu peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM tenaga fungsional Penyuluh Hukum agar lebih profesional melalui uji kompetensi, perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan disinergikan antar instansi. Metode penyuluhan hukum secara langsung melalui ceramah, hendaknya dilakukan lebih menarik masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum Langsung, Kesadaran Hukum Masyarakat

Kata kunci bersumber dari artikel

Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Evi Djuniarti (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 4, Desember 2018, Halaman 497 - 512

Telah terjadi pencangkakan ketentuan-ketentuan perjanjian KUHPdata (transplantasi hukum perjanjian) pada akad pembiayaan bank syariah yang seharusnya secara keseluruhan berdasarkan ketentuan-keketentuan perjanjian menurut hukum Islam, dalam praktek perbankan syariah sudah seharusnya menuangkan syarat dan rukun sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam syariat Islam begitu pula ketika menuangkan ke dalam akad. Praktik riba tidak meningkatkan kekayaan secara merata tetapi justru terakumulasi pada segelintir orang pemilik modal. Perumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapan transplantasi hukum perjanjian pembiayaan menurut KUHPdata ke dalam hukum perjanjian *mudharabah muqayyadah* pada Bank BNI Syariah dan bagaimana ketentuannya jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Metode dalam penulisan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berbasis pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Adopsi hukum sebagai upaya untuk mempermudah proses pelaksanaan hukum pada suatu negara, salah satunya adalah dalam perjanjian syariah

Kata Kunci: Adopsi Hukum Asing, Nasional, Perjanjian Bank Syariah

Syprianus Aristeus (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan bagi Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 4, Desember 2018, Halaman 513 - 524

Kebijakan investasi di Indonesia saat ini masih terkendala adanya peraturan perundang-undangan yang tertinggal dengan ketentuan di bidang investasi. Seiring dengan globalisasi serta keikutsertaan dalam bidang investasi, maka untuk dapat mengantisipasi ketentuan tersebut adalah dengan cara melakukan transplantasi hukum untuk dapat mengisi kekosongan yang terjadi sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara yang terbaik bagi pemerintah Indonesia dalam mengisi kekosongan hukum bisnis saat ini. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, dimana titik berat analisis adalah norma hukum yang terdapat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah bahwa liberalisasi perdagangan khususnya dalam hukum bisnis telah meluas ke segala komoditas, tidak terkecuali dalam hukum bisnis. Bagi pemerintah Indonesia hal ini membawa dampak yang kurang baik mengingat ketertinggalan peraturan perundang-undangan berdampak pada investasi. Untuk dapat mengatasi hal ini, maka pemerintah dapat melakukan transplantasi hukum, khususnya di bidang hukum bisnis.

Kata Kunci: Transplantasi, Hukum Bisnis, Globalisasi

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Nizar Apriansyah (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 4, Desember 2018, Halaman 525 - 542

Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, kekayaan alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan berbagai produk pertanian, perkebunan, budidaya, kerajinan dan kehutanan yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada. potensi alam ini harus dilindungi dalam bingkai produk indikasi geografis sebagai ciri khas produk Indonesia. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan indikasi geografis di Indonesia dan apakah pendaftaran produk/barang indikasi geografis dapat mendorong perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis perlindungan indikasi geografis di Indonesia dan melihat sejauhmana pendaftaran indikasi geografis dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah. Sebagai pisau analisis menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dan sebagai alat pengumpul data berupa pedoman wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian melihat bahwa Perlindungan indikasi geografis di Indonesia terlihat dengan diterbitkannya undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Merek dan Indikasi Geografis Akan tetapi dalam pelaksanaannya Undang-undang masih terdapat kelemahan, dan terdapatnya produk sebagai indikasi geografis memberi nilai tambah terhadap produk tersebut, tetapi peningkatan itu belum dinikmati sepenuhnya oleh petani.

Kata Kunci: Perlindungan, Indikasi geografis, Perekonomian Daerah

Okky Chahyo Nugroho (Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 18, Nomor 4, Desember 2018, Halaman 543 - 560

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi namun sulit untuk dideteksi. Kejahatan ini ditemui di negara berkembang, memiliki jumlah populasi penduduk besar, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki tidak seimbang. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui pertanggungjawaban negara dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan hambatan yang dihadapi di Nusa Tenggara Timur yang menjadi obyek penelitian. Manfaat umum diharapkan sebagai bahan informasi kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, secara khusus diharapkan sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan kebijakan. Metode dalam tulisan ini bersifat dekriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif, menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai data dan informasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pertanggungjawaban negara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan dibentuknya Gugus Tugas pencegahan dan penanganan. Gugus Tugas ini belum optimal karena bersifat koordinatif dan adanya praktek sistem penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang. TPPO sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penanganannya juga harus melalui cara yang luar biasa. Oleh karenanya perlu merevisi Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar pembentukannya menjadi lembaga operasional bukan lembaga koordinatif.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Negara, Pencegahan, Penanganan, Perdagangan Orang

HALAMAN KOSONG